

RENCANA KERJA PERUBAHAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

T A H U N
2022

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2022

K A T A P E N G A N T A R

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 dapat tersusun.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022, untuk menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen ini memuat tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu beserta indikatornya, program dan kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program / kegiatan. Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perubahan sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2022.

Kami menyadari bahwa Renja perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Selanjutnya diharapkan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ini dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Batulicin , Juni 2022
Kepala Pelaksana

Eryanto Rais, SH,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196712091990031012

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv
 Bab I	 Pendahuluan.....	 1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum.....	3
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
	1.4 Sistematika Penulisan.....	8
 Bab II	 Hasil Evaluasi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Lalu.....	 9
	2.1 Evaluasi Pelaksana Renja Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.....	9
	2.2 Analis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.....	20
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.....	50
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	55
	2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	62
 Bab III	 Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.....	 63
	3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional.....	63
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.....	71
 Bab IV	 Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.....	 80
 Bab V	 Penutup.....	 85

DAFTAR TABEL

2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2020 dan Pencapaian Renstra Sampai dengan Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.....	12
2.2	Realisasi Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2022.....	18
2.3	Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021.....	46
2.4	Revisi Terhadap Rancangan RKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.....	56
3.1	Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021.....	72
3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan tahun 2021 dan Prakiraan Maju tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.	75
4.1	Rencana Program dan Kegiatan pada Tahun 2022.....	80
4.2	Rencana Program dan Pendanaan Indikatif Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.....	82

DAFTAR GAMBAR

1.1	Hubungan Antar Dokumen Terhadap Renja PD.....	1.
-----	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

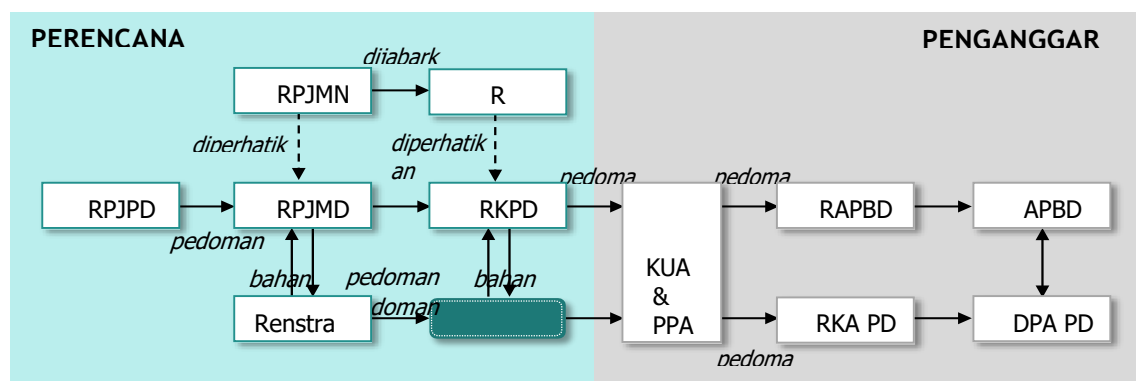
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Tanah Bumbu sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 juga mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022.

Dimana penyusunan Renja dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD; dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Penanggulangan Bencana Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, serta evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, termasuk evaluasi terhadap output pada Renja Tahun 2021 yang terdampak pandemi COVID-19.

Tugas dan Fungsi yang mendukung Visi, dan Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam RPJMD yaitu **Visi** Bupati Tanah Bumbu yaitu **“Membangun Tanah Bumbu Maju, Unggul, Mandiri, Religius, dan Demokratis”** dan Masuk dalam **Misi** ke 2 (dua) yaitu **“Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Mantap untuk Menopong Daya Saing Pelayanan Publik dan Perekonomian”**. BPBD masuk dalam Tujuan ke 1 (satu) dalam RPJMD yaitu Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, dan masuk pada Sasaran ke 5 (lima) yaitu Menurunkan Risiko Terjadinya Bencana dengan Indikator Indeks Risiko Bencana.

Selanjutnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanganan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022.

Sebagai dokumen tahunan, RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (BPBD Tanah Bumbu), mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Badan Penanggulan Bencana Darah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ,tentang Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi Penanggung jawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

- Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4828);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020 – 2024 (Lembaga Negara Tahun 2020 Nomor 204);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana

- Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1570);
25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
 26. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
 29. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu nomor tahun 2022 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun anggaran 2023 (Lembaran daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2022 Nomor);
 31. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan, Kedudukan, Tugas, Pokok, dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembar daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2011 Nomor 6).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja perubahan dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022.
- d. Karena adanya peraturan perundang-undangan dan adanya utang tahunan anggaran 2021 untuk di bayarkan pada anggaran perubahan tahun 2022;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, review terhadap Rancangan Akhir RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DARAH TAHUN LALU

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DARAH KABUPATEN TANAH BUMBU

TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan tahun 2022.

Perubahan, indicator, lokasi, untuk sub kegiatan dijelaskan berdasarkan perubahan komponen Permendagri 50 perubahan ini dapat dilihat pada lampiran matrik TC.3.1

- a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Kabupaten Tanah Bumbu

Pada tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan 2 Program 8 Kegiatan 20 Sub Kegiatan, sebagaimana tercantum pada Perubahan Renja Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/K

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah “**Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah**” dengan target tahun 2022 sebesar 100 % dan realisasi sebesar 50 % pada semester 1 pada bulan Januari s.d Juni 2022 (capaian 50%).

Pada program ini terdapat 5 kegiatan, dimana target indikator kinerja ada 1 kegiatan telah tercapai 100 %. dan 4 Kegiatan baru telah tercapai 50%

Pada Kegiatan ini terdapat 13 Sub kegiatan, dimana target indikator kinerja dari seluruh Sub kegiatan ada 8 Sub Kegiatan telah tercapai 50 % dan 4 Sub Kegiatan belum tercapai 50 % karena adanya pergeseran anggaran kegiatan akan direalisasikan pada triwulan ke 2 pada bulan September perubahan.

2) Program Penanggulangan Bencana

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah “Persentase Penanggulangan Bencana (%) ” dengan target tahun 2022 sebesar 3 % dan realisasi sebesar 1 % pada semester 1 pada bulan Januari s.d Juni 2022 (capaian 1 %).

Pada program ini terdapat 3 kegiatan, dimana target indikator kinerja dari seluruh kegiatan tersebut telah tercapai 50 %.

Pada Kegiatan ini terdapat 7 Sub kegiatan, dimana target indikator kinerja dari seluruh Sub kegiatan ada 5 telah tercapai 50 %. dan 2 Sub Kegiatan belum tercapai 50 % karena adanya pergeseran anggaran kegiatan akan direalisasikan pada triwulan ke 2 pada bulan September perubahan

Pada program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota ini terdapat 1 (satu) kegiatan, dimana target indikator kinerja dari kegiatan tersebut telah tercapai 100 % Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya pada Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya.

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2022 Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2022
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN Urusan Wajib Pelayanan Dasar										
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	100,00 %	100%	100%	100%	100,00	0	0	0
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terselenggara dengan baik	100,00 %	100%	100%	100%	100,00	0	0	0
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	60 bln	12,00	12	6	50,00	12	6	0,1
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN								
1.05.01.2.02.05	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Ketersediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	60 bln	12,00	12	6	50,00	12	6	0,1
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi								
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	100,00 %	100%	100%	100%	100,00	0	0	0

1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan yang diadakan	390 Stel	60	60	60	100,00	60	120	100
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan								
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00 %	100%	100%	100%	100,00	0	0	0
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ikantor yang disediakan	1313 buah		260	0				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan								
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	400 unit		80	0	0			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan logistic kantor yang disediakan	60 bln	12,00	12	6	50,00	12	6	0,1
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan								
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang cetak dan penggandaan	Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	60 bln	12,00	12	0	,00	12	0	0,0
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan								
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	500 Kali	36,00	12	12	100,00	12	60	100
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100,00 %	100%	100%	100%	100,00	0	0	0
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia								

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Jasa pelayanan umum kantor	60 bln	36,00	12	12	100,00	12	60	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan								
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100,00 %	100%	100%	100%	100,00	0	0	0
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara	60 bln	36,00	12	12	100,00	12	60	100
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya terehabilitasi/terpelihara	60 bln	36,00	12	12	100,00	12	60	100
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								
1.05.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya terehabilitasi/terpelihara	60 bln	36,00	12	12	100,00	12	60	100
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	15,00 %	0,00	-	-	100,00	-	0	0
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100,00 %	100%	100%	100%	100,00	0	0	0
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen wajib manajemen kebencanaan yang tersusun	80	0,00	20 unit	10 unit	50,00	20 unit	30	0

		Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi								
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah penduduk yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis bencana								
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (PerJenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya								
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan di daerah rawan bencana	100,00 %	100%	100%	100%	100,00	0	0	0
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data kelompok rentan	150,00	50	50 org	50 org	100,00	50 org	150	0
		Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi								
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana	0	0	1	0	0	1	0	0
		Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)								
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Korban Bencana yang berhasil ditangani	100,00 %	100%	100%	100%	100,00	0	0	0
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Laporan Cepat Darurat Bencana Kabupaten								

		SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat								
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Laporan Pencarian Korban Bencana dan Musibah								
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								

Dan Seterusnya.....

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, 2022

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
	URUSAN Pemerintahan Bidang ketenraman dan Ketertiban Umum Serta perlindungan Masyarakat	6.002.883.418	2.217.583.538	43,81%	3.785.299.880
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten				
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.207.780.408	1.810.624.838		2.397.155.570
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.474.969.608	1.454.131.296	23,19%	1.020.838.312
2	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	1.923.091.688	1.243.601.706	3,58%	679.489.982
II	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	551.877.920	210.529.590		341.348.330
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	60.000.000	0	0,00%	60.000.000
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.000.000	0		60.000.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	707.645.800	114.957.836	0,00%	592.687.964
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.082.800	0	0,00%	14.082.800
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	123.765.000	0	0,38%	123.765.000
4	Penyediaan Barang cetak dan penggandaan	104.545.000	13.374.600	0,00%	91.170.400
5	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi	17.000.000	0	2,50%	17.000.000
IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	448.253.000	101.583.236		346.669.764
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	487.690.000	205.601.706	2,51%	282.088.294
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	268.245.000	71.665.706	2,28%	196.579.294
V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	219.445.000	133.936.000		85.509.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau	477.475.000	35.934.000	2,46%	441.541.000

	lapangan				
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	227.145.000	29.934.000	0,00%	197.211.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung atau bangunan lainnya	170.965.000	0	0,10%	170.965.000
B	Program Penanggulangan Bencana	1.795.103.010	406.958.700	8,96%	1.388.144.310
I	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	366.558.400	118.447.600	100 %	248.110.800
1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	133.191.300	4.500.000	0,07%	128.691.300
2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	233.367.100	113.947.600	1,90%	119.419.500
II	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	423.497.150	34.011.650		389.485.500
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	235.380.000	0	0,00%	235.380.000
2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	70.545.000	0	0,00%	70.545.000
3	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	117.572.150	34.011.650	0,57%	83.560.500
III	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.005.047.460	254.499.450		750.548.010
1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	417.707.100	70.928.950	1,19%	346.778.150
2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	587.340.360	183.570.500	3,07%	403.769.860

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, 2020

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 (satu) urusan yaitu **Urusan Pemerintahan Bidang ketenraman dan Ketertiban Umum Serta perlindungan Masyarakat**, 2 (dua) Program, dan 8 (delapan), Kegiatan 20 (duapuluh), Sub Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebesar **Rp 6.002.883.418,00**. Dari anggaran tersebut, realisasinya sampai bulan Juni adalah sebesar **Rp. 2.217.583.538,00 (43,81%)** dengan sisa sebesar **Rp. 3.785.299.880,00 (56,19%)**, dengan uraian sebagai berikut :

- a. **ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**; anggaran sebesar Rp 4.207.780.408,- dengan realisasi sampai bulan juni sebesar Rp. 1.810.624.838,00,- (0,43%);
- b. **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**; anggaran sebesar Rp. 1.795.103.010,00,- dengan realisasi sampai bulan Juni 2022 sebesar Rp 406.958.700,00,- (0,08 %).

Untuk Belanja umumnya dikarenakan Sebagian bersifat situasional dikarenakan tidak adanya kejadian bencana sampai bulan Juni 2022.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Penyelenggaraan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah melaksanakan fungsi sebagai Penyelenggaraan suatu urusan perlu ditetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja BPBD Kabupaten Tanah Bumbu mengacu ada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut yang akan menjadi tolak ukur kinerja yang akan dicapai di Kabupaten Tanah Bumbu, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel T.C. 30 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Sampai Dengan Tahun 2021

1

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
A	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (RPJM dasarnya)													
B	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Penerapan Standar Pelayanan Minimal													
1	Bidang Trantibumlinmas	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%	
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100%	
C	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020													
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			119.568	1.350	301.699	301.699	68,787				1.350	301.699	
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			74.829	240	301.699	301.699	74.732				240	301.699	

3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			36.946	21.303	37.018	36.100	36.946				21.303	37.018	
D	RKPD tahun 2022													
	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana			100%	100 %	100 %		100%				100 %	100 %	
	Jumlah orang yang tersedia untuk melaksanakan sosialisasi KIE rawan bencana lintas kabupaten/kota			150 orang	150 orang	4 orang		150 orang				150 orang	4 orang	
	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal meliputi dokumen pra bencana, tanggap darurat bencana dan pascabencana			1%	100 %	100 %		1%				100 %	100 %	
	Jumlah personil TRC tingkat provinsi yang ditingkatkan kapasitas teknis manajerial			%	2 orang	2 orang		%				2 orang	2 orang	
	Permendagri Nomor 59 Tahun													

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, 2021

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Indikator Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Indikator Pelayanan Informasi Rawan Bencana dari Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana telah mencapai 23 % dari Jumlah penduduk 301.699 di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sebanyak 68,787 penduduk sesuai jenis ancaman bencana Adapun usaha yang dilakukan oleh BPBD dalam hal peningkatan kapasitas sebagai indikator penurunan indeks risiko bencana adalah: Himbauan melalui radio pemerintah, surat edaran ke seluruh camat di Kabupaten Tanah Bumbu, pemasangan baleho, spanduk, dan pembagian laflet, sosialisasi dan desiminasi kebencanaan di lokasi rawan bencana, pelatihan relawan kebencanaan, apel siaga bencana. Disamping itu dukungan sarana dan prasarana yang bertambah, juga adanya dukungan dari instansi terkait.
- 2) Indikator Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dari Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana telah mencapai 25 % dari Jumlah penduduk 301.699 yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebanyak 74.732, usaha yang dilakukan untuk pengurangan tersebut adalah pembuatan bronjong oleh instansi terkait di pantai, BPBD juga ikut andil berupa himbauan kepada warga agar tidak melakukan pengrusakan lingkungan di wilayah: melalui radio pemerintah, surat edaran keseluruhan camat di kabupaten tanah bumbu, pemasangan baleho, spanduk dan pembagian laflet, sosialisasi dan desiminasi kebencanaan di lokasi rawan bencana, pelatihan relawan kebencanaan/relawan Masyarakat Peduli Api (MPA), Apel Siaga Bencana, Pengembangan Desa Tangguh Bencana Karhutla pada 4 (empat) desa rawan karhutla, Di samping itu dukungan sarana dan prasarana yang bertambah, juga adanya dukungan dari instansi terkait

3) Indikator Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dari Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang Berhasil ditangani telah mencapai dengan target 100%, dimana realisasinya 100 % (Capaian sebesar 100%), Capaian ini masuk dalam kategori *Sangat Baik*, Karena capaian sesuai dengan target yaitu 100%. Melalui Rata-rata waktu tanggap darurat (Respon Time) telah mencapai dengan target < 2 jam, dimana realisasinya < 2 jam (capaian sebesar < 2 jam), Target < 2 jam dan capaian < 2 jam yang dimaksud adalah Penanganan tanggap darurat (respond time) kurang dari < 2 jam bencana yang dimulai dari Informasi kejadian bencana yang didapatkan dari sumber kejadian yang akan dilakukan dalam hal penanganan bencana tersebut, baik itu bencana banjir, angin putting beliung, tanah longsor maupun bencana lainnya.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam pelaksanaan fungsinya di bidang Koordinator, Komando dan Pelaksana dalam Tugas Penanganan Bencana meliputi Pra Bencana (sebelum terjadinya bencana), Saat Bencana (saat tanggap bencana), dan Pasca Bencana (masa setelah keadaan darurat bencana berlalu). juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Secara umum kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Perubahan Renja Tahun 2021 maupun Renstra Tahun 2016-2021 sudah mencapai sasaran strategis yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penanggulangan Bencana dalam misi ke 2 (dua) yaitu “ Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Mantap untuk Menopang Daya Saing Pelayanan Publik dan Perekonomian “

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi sebagai koordinator, komando, dan pelaksana

dalam tugas penanggulangan bencana diantaranya :

- a. Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif dan lintas sektor;
- b. Belum dipahaminya bahwa focus penanggulangan bencana adalah pencegahan atau mitigasi berbasis pengurangan risiko bencana;
- c. Belum ada unsur pengarah penanggulangan bencana sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Aparatur yang ada belum memiliki kompetensi dan jumlah yang memadai;
- e. Kurang optimalnya Pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. Kurangnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal;
- g. Belum adanya / lengkapnya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk Pengurangan Risiko Bencana;
- h. Terdapat 8 (delapan) Ancaman Bencana dengan Risiko sedang tinggi, Tingkat kerentanan terhadap ancaman Bencana masih tinggi, Tingkat kapasitas dalam menghadapi ancaman bencana masih rendah, Belum dipahaminya kajian atas risiko bencana dan pemetaannya oleh semua pihak yang berkepentingan;
- i. Masih kurangnya kelurahan/desa Tanggap Bencana dengan pendanaan APBD;
- j. Belum optimalnya Satgas/Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
- k. Belum optimalnya ketersediaan anggaran, personil dan Kerjasama dengan stakeholder lain.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, khususnya di tahun 2022 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

- 1) Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- 2) Menetapkan standarisasi dan kemudahan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- 4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- 5) Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 6) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati sebulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana;
- 7) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- 8) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan;
- 9) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. Peluang

- 1) Kebijakan Nasional Pengarus utamaan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan;
- 2) Tersedianya Pusdiklat Kebencanaan BNPB;
- 3) Tersedianya Peraturan perundang-undangan.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah

Bumbu sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu. Pencapaian visi dan misi Bupati dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu beserta indikator dan targetnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah memiliki beberapa fungsi dimana salah satunya adalah Mewujudkan Infrastruktur wilayah yang mantap untuk Menopang Daya Saing Pelayanan Publik dan Perekonomian, sesuai dengan visi dan misi Bupati. Karena itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya - upaya pengkoordinasian pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026;
- b. Pandemi COVID-19 beserta Dampaknya
Terkait terjadinya pandemi COVID-19, Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu mengkoordinasikan perencanaan tahun 2022 dalam rangka pemulihan paska pandemi. Selain itu pandemi tersebut juga menyebabkan dilakukannya realokasi anggaran pada tahun 2021, dimana alokasi anggaran dari beberapa output strategis harus ditunda pelaksanaannya. Terkait hal ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu mengkoordinasikan penganggaran kembali output strategis tersebut pada tahun 2022;
- c. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, penerapan standar dan prosedur kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan.

Secara Kinerja Pelayanan Indikator SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu terhadap

target yang tercantum dalam dokumen perencanaan mempunyai 3 (tiga) jenis Pelayanan Dasar :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dari 3 (tiga) target Indikator SPM pencapaian 100% dengan pelayanan kebencanaan.

Monitoring merupakan upaya yang dilakukan secara rutin untuk mengidentifikasi pelaksanaan dari berbagai komponen Program dan kegiatan sebagaimana telah dijadwalkan, dan kemajuan dalam mencapai tujuan dan Program dan Kegiatan.

Monitoring merupakan fungsi manajemen yang berkesinambungan yang mempunyai tujuan utama menyediakan umpan balik dan indikasi awal tentang bagaimana kegiatan – kegiatan dilaksanakan, perkembangan atau pencapaian kinerja dari waktu ke waktu serta pencapaian hasil yang diharapkan.

Untuk itu diperlukan suatu alat ukur yang berupa indikator-indikator yang sesuai dengan kebutuhan yang dituangkan kedalam instrument monitoring. Disamping itu monitoring diperlukan agar dapat diketahui apakah pelaksanaan kegiatan sesuai atau tidak sesuai dengan rencana sehingga dapat dilakukan tindak perbaikan atau preventif jika diperlukan.

Sementara Evaluasi diperlukan agar dapat diketahui taraf pencapaian tujuan dari kegiatan, sehingga dapat diambil suatu keputusan atau kebijakan lebih lanjut mengenai program dan kegiatan tersebut.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam SDGs yaitu:

- a. 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
- b. 1.5.4* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Awal RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Renja perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 24.T-C.31
Review terhadap Rancangan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.1	URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN DASAR				6.002.883.418	URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN DASAR				6.075.883.418	
01	Program . Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Tanah Bumbu	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Perangkat Daerah	100%	4.207.780.408	Program . Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Tanah Bumbu	Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Perangkat Daerah	100%	4.421.669.318	
1.05.01.2.02	Kegiatan.. Administrasi keuangan perangkat daerah	Tanah Bumbu	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terselenggara dengan baik	100%	2.474.969.608	Kegiatan.. Administrasi keuangan perangkat daerah	Tanah Bumbu	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terselenggara dengan baik	100%	3.139.808.118	
1.05.01.2.02.01	Sub Kegiatan. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tanah Bumbu	Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	12 bulan	1.923.091.688	Sub Kegiatan. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tanah Bumbu	Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	12 bulan	2.628.573.588	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/Bulan				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/Bulan		
1.05.01.2.02.5	Sub Kegiatan.. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tanah Bumbu	Ketersediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	12 bulan	551.877.920	Sub Kegiatan.. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tanah Bumbu	Ketersediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	12 bulan	511.234.530	
			Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	1 Dokumen				Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	1 Dokumen		
1.05.01.2.05	Kegiatan.. Administrasi kepegawian perangkat daerah	Tanah Bumbu	Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	100%	60.000.000	Kegiatan.. Administrasi kepegawian perangkat daerah	Tanah Bumbu	Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	100%	42.000.000	

1.05.01.2.05.01	Sub Kegiatan... Pengadaan pakaian dinas beserta atribut	Tanah Bumbu	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan yang diadakan	60 stel	60.000.000	Sub Kegiatan... Pengadaan pakaian dinas beserta atribut	Tanah Bumbu	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan yang diadakan	60 stel	42.000.000	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	63 Paket				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	63 Paket		
1.05.01.2.06	Kegiatan.. Administrasi umum perangkat daerah	Tanah Bumbu	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	707.645.800	Kegiatan.. Administrasi umum perangkat daerah	Tanah Bumbu	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	466.334.400	
1.05.01.2.06.01	Sub Kegiatan.. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tanah Bumbu	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ikantor yang disediakan	12 bulan	14.082.800	Sub Kegiatan.. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tanah Bumbu	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ikantor yang disediakan	12 bulan	5.230.400	
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ikantor yang disediakan	1 Paket				Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ikantor yang disediakan	1 Paket		
1.05.01.2.06.02	Sub Kegiatan.. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tanah Bumbu	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 bulan	123.765.000	Sub Kegiatan.. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tanah Bumbu	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 bulan	12.000.000	
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 paket				Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 paket		
1.05.01.2.06.02	Sub Kegiatan.. Penyediaan bahan logistik kantor	Tanah Bumbu	Bahan logistic kantor yang disediakan	12 bulan	104.545.000	Sub Kegiatan.. Penyediaan bahan logistik kantor	Tanah Bumbu	Bahan logistic kantor yang disediakan	12 bulan	115.475.000	
			Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	12 paket				Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	12 paket		
1.05.01.2.06.05	Sub Kegiatan.. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tanah Bumbu	Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	17.000.000	Sub Kegiatan.. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tanah Bumbu	Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	2.800.000	

			Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket				Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket		
1.05.01.2.06.09	Sub Kegiatan.. Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tanah Bumbu	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	448.253.000	Sub Kegiatan.. Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tanah Bumbu	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	330.829.000	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen		
1.05.01.2.08	Kegiatan.. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tanah Bumbu	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	487.690.000	Kegiatan.. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tanah Bumbu	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	485.786.800	
1.05.01.2.08.02	Sub Kegiatan... Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tanah Bumbu	Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	12 Bulan	268.245.000	Sub Kegiatan... Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tanah Bumbu	Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	12 Bulan	196.245.000	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan.	1 Laporan				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan.	1 Laporan		
1.05.01.2.08.04	Sub Kegiatan.. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.	Tanah Bumbu	Jumlah Pembayaran Jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	219.445.000	Sub Kegiatan.. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.	Tanah Bumbu	Jumlah Pembayaran Jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	289.541.800	
			Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 laporan				Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 laporan		
1.05.01.2.09	Kegiatan.. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tanah Bumbu	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%	477.475.000	Kegiatan.. Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Tanah Bumbu	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%	287.740.000	
1.05.01.2.09.02	Sub Kegiatan.. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, dan perizinana dan kendaraan	Tanah Bumbu	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara	12 bulan	227.145.000	Sub Kegiatan.. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, dan perizinana dan kendaraan	Tanah Bumbu	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara	12 bulan	209.745.000	

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya.	25 unit				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya.	25 unit		
1.05.01.2.09.09	Sub Kegiatan. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.	Tanah Bumbu	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainnya terehabilitasi/terpelihara	3 unit	170.965.000	Sub Kegiatan. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.	Tanah Bumbu	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainnya terehabilitasi/terpelihara	3 unit	31.510.000	
			Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.	3 unit				Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.	3 unit		
1.05.01.2.09.11	Sub Kegiatan.. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya.	Tanah Bumbu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	80 unit	79.365.000	Sub Kegiatan.. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya.	Tanah Bumbu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	80 unit	46.485.000	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.	2 Unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.	2 Unit		
xx	Program Penanggulangan Bencana	Tanah Bumbu	Persentase menurunnya Risiko bencana	100%	1.795.103.010	Program Penanggulangan Bencana	Tanah Bumbu	Persentase menurunnya Risiko bencana	100%	1.654.214.100	
1.05.03.2.01.	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tanah Bumbu	Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		366.558.400	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tanah Bumbu	Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		627.213.100	
1.05.03.2.01.01	Sub Kegiatan. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen wajib manajemen kebencanaan yang tersusun	1 Dok	133.191.300	Sub Kegiatan. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen wajib manajemen kebencanaan yang tersusun	1 Dok	346.146.000	
			Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang dilegalisasi	1 Dok				Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang dilegalisasi	1 Dok		
1.05.03.2.01.02	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikas, Infomasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tanah Bumbu	Jumlah penduduk yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis bencana	150 orang	233.367.100	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikas, Infomasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Tanah Bumbu	Jumlah penduduk yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis bencana	150 orang	281.067.100	

						Kabupaten/Kota					
			Jumlah Orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (PerJenis Bencana) Secara Tatap Muka Kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang ada di Kawasan Tempat Tinggalnya.	150 orang				Jumlah Orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (PerJenis Bencana) Secara Tatap Muka Kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang ada di Kawasan Tempat Tinggalnya.	150 orang		
1.05.03.2.02.2	Kegiatan. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tanah Bumbu	Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan di daerah rawan bencana	100 %	423.497.150	Kegiatan. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tanah Bumbu	Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan di daerah rawan bencana	100 %	171.467.150	
1.05.03.2.02.01	Sub Kegiatan.. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tanah Bumbu	Jumlah Dokumen data kelompok rentan	1 Dok	235.380.000	Sub Kegiatan.. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tanah Bumbu	Jumlah data penduduk kelompok rentan tersusun	1 Dok	16.530.000	
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi	1 Dok				Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi	1 Dok		
1.05.03.2.02.02	Sub Kegiatan.. Pelatihan, Pencegahan, dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Tanah Bumbu	Anggota Relawan yang terlatih	50 orang	70.545.000	Sub Kegiatan.. Pelatihan, Pencegahan, dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Tanah Bumbu	Anggota Relawan yang terlatih	50 orang	27.565.000	
			Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	50 orang				Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	50 orang		
1.05.03.2.02.07	Sub Kegiatan. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota..	Tanah Bumbu	Jumlah Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana	1 Dok	117.572.150	Sub Kegiatan. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota..	Tanah Bumbu	Jumlah pengkajian kebutuhan pascabencana	1 Dok	127.372.150	
			Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana	1 Dok				Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana	1 Dok		

			Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P).					Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P).			
1.05.03.2.03	Kegiatan. Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tanah Bumbu	Prentase korban bencana yang berhasil ditangani	100 %	1.005.047.460	Kegiatan. Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tanah Bumbu	Prentase korban bencana yang berhasil ditangani	100 %	855.533.850	
1.05.03.2.03.02	Sub Kegiatan. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Tanah Bumbu	Tertanganinya korban bencana alam dan musibah	100 %	417.707.100	Sub Kegiatan. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Tanah Bumbu	Tertanganinya korban bencana alam dan musibah	100 %	346.494.850	
			SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kajo cepat.	1 Dokumen				SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kajo cepat.	1 Dokumen		
1.05.03.2.03.04	Sub Kegiatan.. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tanah Bumbu	Jumlah sarana dan prasaranan evakuasi penanganan kebencanaan dan presentase terpenuhinya logistic dan obat-obatan bagi korban bencana alam dan musibah	8 jenis	587.340.360	Sub Kegiatan.. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tanah Bumbu	Jumlah sarana dan prasaranan evakuasi penanganan kebencanaan dan presentase terpenuhinya logistic dan obat-obatan bagi korban bencana alam dan musibah	8 jenis	509.039.000	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	37.018 orang				Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	37.018 orang		

SUMBER : **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**, Kabupaten Tanah Bumbu, 2021

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2022 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2021, yaitu melalui Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tanggung jawab dalam sifat Top Down.

Khusus untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Selain itu juga terdapat pertanyaan maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD yang ditujukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, antara lain :

a. Tidak Ada Usulan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH

KABUPATEN TANAH BUMBU

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN TANAH BUMBU

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 tema yang diangkat dalam RKP adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 10 Fokus Pembangunan yang meliputi:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
- 5. Infrastruktur**
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan
10. Reformasi Kesehatan

Secara rinci 10 (sepuluh) fokus pembangunan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Fokus pembangunan industri dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor industri, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan Industri pengolahan Non Migas 5,8-6,5%
 - b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas 17,97-17,99%
 - c. Nilai realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan Rp 352,5
2. Fokus pembangunan pariwisata dilakukan untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Jumlah Wisatawan Mancanegara 8,5-10,5 juta kunjungan
 - b. Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index 36-39

3. Fokus pembangunan ketahanan pangan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Skor Pola Pangan Harapan 92,8
 - b. Nilai Tukar Petani 102-104
 - c. Nilai Tukar Nelayan 102-105
 - d. Ketersediaan Beras 44 juta ton
 - e. Ketersediaan protein hewani 2,7 juta ton
 - f. Nilai tambah tenaga kerja pertanian Rp. 54,3 juta/org/thn
4. Fokus pembangunan UMKM dilakukan untuk meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan Wirausaha 3%
 - b. Kontribusi UMKM terhadap PDB 63%
 - c. UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal 20,9%
5. Fokus pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pembangunan 4.600 unit Rumah Susun, Bantuan Perumahan Swadaya 118.650 unit, dan Penyaluran FLPP sebanyak 200.000 unit.
 - b. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: 10 lokasi
 - c. Panjang jalan tol baru: 400 km
 - d. Penambahan Debit Air Baku 5 m³/s
 - e. Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan 2.000.000 SR
 - f. Pembangunan akses sanitasi aman (sistem terpusat dan sistem setempat) 2.000.000 SR
 - g. Rehabilitasi Jaringan Irigasi 250 ribu Ha
 - h. Konsumsi listrik per kapita 1.268 kWh
6. Fokus transformasi digital dilakukan untuk Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Masyarakat pengguna internet 79,20%
 - b. Kecamatan yang terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik kumulatif 42,85%

- c. 72.500 SDM talenta digital
 - d. 12,4 juta local champion literasi digital
 - e. 27 Organisasi Tim Cepat Tanggap (CSIRT) yang Diregistrasi
 - f. 100 Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber
7. Fokus pembangunan rendah karbon dilakukan untuk meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK), yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Penurunan emisi GRK Nasional terhadap Baseline 26,87%
 - b. Penurunan intensitas Emisi GRK Nasional terhadap Baseline 21,54%
 - c. Porsi Bauran EBT dalam Energi Nasional 15,7%
 - d. Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT kumulatif 13,9 GW
8. Fokus reformasi perlindungan sosial dilakukan untuk mempercepat reformasi perlindungan sosial, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Tingkat kemiskinan 8,5-9%
 - b. Penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial 87%
 - c. Rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial 60%
 - d. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk berpendapatan terbawah 110.7 Juta Penduduk
9. Fokus reformasi pendidikan dan keterampilan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Pekerja pada Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi 41,55%
 - b. Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA Sederajat 70,6%
 - c. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi 35,62%
 - d. 400 Produk Inovasi dari Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)
 - e. 900 Paten Domestik
10. Fokus reformasi kesehatan dilakukan dalam rangka penanganan

Covid-19 dengan meneruskan Vaksinasi Covid-19, serta untuk memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita 18,4%
- b. Insidensi TB 231/100.000 penduduk
- c. Persalinan di fasilitas kesehatan 91%
- d. Imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan 71%
- e. Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 59%
- f. RSUD kab/kota dengan 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya 80%
- g. Fasilitas Kesehatan terakreditasi: FKTP 80% & RS 90%
- h. Sistem surveilans: terpadu, real-time, berbasis lab.

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2021, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 %
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6.24 - 5.52 %
3. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 – 73,48
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8 – 27,1 %
6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102-104
7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102-105
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %.

Kemudian pada tingkat Kabupaten Tanah Bumbu, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJPD tahun 2006-2025 dan Dokumen Rancangan Awal RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2021-2026, yaitu **“Membangun Tanah Bumbu Maju, Unggul, Mandiri, Religius dan Demokratis”**. Sebagai upaya dalam mewujudkan Visi maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Produktif dan Ber Akhlak Mulia
2. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Mantap untuk Menopang Daya Saing Pelayanan Publik dan Perekonomian
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Arif dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
4. Mewujudkan Perekonomian Daerah Berbasis Pengembangan Potensi Maritim dan Agroindustri
5. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel.

Sedangkan rumusan tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 adalah **“Memantapkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia Untuk Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan”** dengan lima prioritas daerah, yaitu :

1. **Pembangunan SDM yang Memiliki Daya Saing Global**, dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:
 - a. Perbaikan Kualitas dan Akses Penyelenggaraan Pendidikan secara Luas;
 - b. Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif Kesehatan;
 - c. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - d. Peningkatan Upaya Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
 - e. Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting;
 - f. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja;
 - g. Peningkatan Kapasitas, Kompetensi dan Daya Saing Pemuda;
 - h. Peningkatan Sarana Dan Prasana Olahraga;
 - i. Peningkatan Layanan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan;
 - j. Peningkatan Akses dan Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak Serta Pemberdayaan Perempuan;
 - k. Peningkatan Akses, Perlindungan, Pemberdayaan dan

- Pelayanan Bagi Kelompok Disabilitas, dan Lansia;
k. Peningkatan Kualitas Perlindungan Masyarakat.

2. **Pemulihan Investasi, Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Penanggulangan Kemiskinan**, dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Pembangunan Sarana Prasarana Perdagangan;
- b. Peningkatan Produktifitas Pangan;
- c. Peningkatan Jumlah Investor dan Nilai Investasi;
- d. Peningkatan Produktifitas Usaha Mikro dan Kecil;
- e. Peningkatan Kunjungan Wisatawan;
- f. Peningkatan Sarana dan Prasaran Tranportasi;
- g. Percepatan Penurunan Kemiskinan;
- h. Perlindungan PMKS;
- i. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Sosial;
- j. Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja.

3. **Pembangunan Infrastruktur yang terpadu dan Merata Berwawasan Lingkungan**, dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan Sarana Prasarana Strategis Perkotaan;
- b. Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jalan Baru;
- c. Peningkatan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas;
- d. Penurunan Luasan Kawasan Kumuh;
- e. Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Minum Aman;
- f. Peningkatan Cakupan Akses Sanitasi Layak;
- g. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman;
- h. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir;
- i. Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana;
- j. Pengembangan Fungsi Ruang Terbuka;
- k. Peningkatan Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

4. **Pembangunan Masyarakat yang Agamis**, dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan;
 - b. Peningkatan Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan Perorangan/Kelompok;
 - c. Peningkatan Musyawarah Antar Umat Beragama;
 - d. Peningkatan Pembinaan Pasangan Usia Subur;
 - e. Pembangunan Rumah Tahfiz di setiap Desa.
5. **Pemantapan Pelayanan Pemerintahan dan Penyederhaan Birokrasi yang Bersih, Berwibawa dan Profesional**, dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan;
 - b. Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Prima;
 - c. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
 - d. Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah;
 - e. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah;
 - f. Peningkatan Inovasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - g. Peningkatkan Status dan Kemajuan Kemandirian Desa;
 - h. Peningkatkan Penyediaan Data dan Informasi Dasar Bagi Pembangunan Desa
 - i. Mendukung Percepatan Penyederhaan Birokrasi.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Makro yang ditetapkan Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2023, antara lain meliputi :

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.72 - 0.78 %
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6.02 - 5.88 %
3. Indeks Kesolehan Sosial 68.00 - 68.58
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71.91 - 72.15
5. Infrastruktur yang Mantap 52.06 - 56.98 %
6. Tingkat Kemiskinan sebesar 4.29 - 4.19 %
7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 76.15 - 76.83
8. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi 60.69 - 60.91 (CC)
9. PDRB Sub Sektor Pertanian (ADHB) 1.64 - 2.50 %
10. PDRB Sub Sektor Perikanan (ADHB) 3.56 - 3.72 %
11. PDRB Sub Sektor Perkebunan (ADHB) 1.06 - 2.24 %
12. PDRB Sub Sektor Peternakan (ADHB) 1.90 - 2.26 %
13. PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB) 0.36 - 5.84 %
14. Pertumbuhan Investasi 9.96 - 10.02 %

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendukung pencapaian prioritas ke tiga, yaitu **“Pembangunan Infrastruktur yang terpadu dan Merata Berwawasan Lingkungan”**.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022, yaitu : **“Meningkatnya Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana”** dengan indikator tujuan **“Indeks Ketahanan Daerah”**

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan dengan 1 (satu) sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yaitu : **“Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana”** dengan Indikator Sasaran **“Angka Kapasitas Daerah terhadap Bencana”**

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatnya ketahanan Daerah menghadapi bencana	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Ketahanan Daerah 	%	1,4
SASARAN : Meningkatnya Kapasitas daerah terhadap bencana	<ul style="list-style-type: none"> Angka kapasitas daerah terhadap bencana 	%	0,5

Sumber : *Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, 2021*

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 serta Rancangan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Secara khusus, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “**Penanganan Kebencanaan**” dan indikator sasaran “**Menurunkan Risiko Bencana**”;
3. Berkorelasi dan bersinergi dengan kebijakan nasional;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19;
8. Peningkatan tugas pokok dan fungsi kelembagaan BPBD.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2022 adalah sebanyak 2 (dua) Program, yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 1 (satu) program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2022 adalah sebanyak 8 (delapan) kegiatan, dan 20 (dua puluh) sub Kegiatan;
3. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 adalah sebesar Rp 6.075.883.418,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, dengan perincian :
 - a. Rp 4.421.669.318,- untuk Program dan kegiatan penunjang (Program Penunjang Urusan Pemerintahan/ eks rutin);
 - b. Rp 1.654.214.100,- untuk Program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan (Program Penanggulangan Bencana).

Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3.1	URUSAN				6.075.883.418				13.386.837.124
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah		100%	4.421.669.318			100%	6.586.837.124
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terselenggara dengan baik		100%	3.139.808.118	APBD	-	100%	4.360.977.224
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12 bulan	2.628.573.588	APBD	-	20	3.598.871.154
1.05.01.2.02.05	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 bulan	511.234.530	APBD	-	1	762.106.070
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi dan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah		100%	42.000.000	APBD	-	100%	67.680.000
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		60 stel	42.000.000	APBD	-	63	67.680.000
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	466.334.400	APBD		100%	1.277.948.700
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 bulan	5.230.400	APBD		1	23.562.400

1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 bulan	12.000.000	APBD		7	667.133.300
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 bulan	115.475.000	APBD		12	91.400.000
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12 bulan	2.800.000	APBD		2	71.275.000
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 bulan	330.829.000	APBD		1	392.133.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1	32.445.000
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100%	485.786.800	APBD		100%	552.351.200
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Bulan	196.245.000	APBD		1	297.245.000
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 bulan	289.541.800	APBD		1	255.106.200
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik		100%	287.740.000	APBD		100%	934.750.000
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		12 bulan	209.745.000	APBD		25	411.395.000
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 unit	31.510.000	APBD		3	195.965.000
1.05.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		80 unit	46.485.000	APBD		2	163.695.000

1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana		100%	1.654.214.100	APBD		100	8.745.000.000
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			627.213.100	APBD		100	1.350.000.000
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi		1 Dok	346.146.000	APBD		1	650.000.000
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya		150 orang	281.067.100	APBD		150	700.000.000
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan di daerah rawan bencana		100 %	171.467.150	APBD		100	4.475.000.000
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi		1 Dok	16.530.000	APBD		1	750.000.000
1.05.03.2.02.02	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		0	27.565.000	APBD		50	165.000.000
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)		1 Dok	127.372.150	APBD			
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Korban Bencana yang berhasil ditangani		100 %	855.533.850	APBD		100	2.150.000.000
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat		100 %	346.494.850	APBD		1	730.000.000

	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana						37.018	570.000.000
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		8 jenis	509.039.000	APBD		37.018	850.000.000
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan	Presentase korban bencana yang berhasil ditangani						100	770.000.000
1.05.03.2.04.06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)						1 Dok	770.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN TANAH BUMBU

Berdasarkan Rencana Strategisn Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 - 2026 Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran berkurangnya potensi kerawanan bencana alam sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Adapun Rencana Program dan Kegiatan pada tahun 2022 sebagai Berikut :

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan pada tahun 2022

No	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan
1	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana
1.1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya
1.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan di daerah rawan bencana
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi
	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
	Penanganan Pascabencana	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca

	Kabupaten/Kota	Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)
1.3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Korban Bencana yang berhasil ditangani
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Jumlah program yang akan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2022 adalah sebanyak 2 (dua) Program, yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan **1 (satu) program pelaksanaan / pembangunan;**

1. **Program penunjang** (Program pada setiap perangkat daerah / eks rutin) Jumlah 5 (lima) kegiatan dan 13 (tiga belas) Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2022 adalah sebanyak 8 (delapan) kegiatan, dan 20 (dua puluh) sub Kegiatan;
2. **Program pelaksanaan / pembangunan** Jumlah 3 (tiga) kegiatan dan 7 (tujuh) Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2022 adalah sebanyak 8 (delapan) kegiatan, dan 20 (dua puluh) sub Kegiatan. Seperti yang tercantum dalam table berikut :

Tabel 4.2 T.C 3.4
Rencana Program dan Pendanaan Indikatip Tahun 2022
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	APBN			APBD		CSR	Desa	Ket
				Dak	Hibah	Ban sos	Kab	Prov			
3.1	URUSAN										
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	100%				1.654.214.100				
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana					627.213.100				
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dok				346.146.000				
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	150 orang				281.067.100				
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan di daerah rawan bencana	100 %				171.467.150				
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dok				16.530.000				
1.05.03.2.02.02	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0				27.565.000				

1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 Dok				127.372.150				
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Korban Bencana yang berhasil ditangani	100 %				855.533.850				
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	100 %				346.494.850				
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	8 jenis				509.039.000				

BAB V

PENUTUP

BAB V

P E N U T U P

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja perubahan ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Penyusunan Renja perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini berpedoman pada Rancangan Awal Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026.
3. Penyusunan Renja perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Renja perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022;

2. berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 untuk setiap triwulannya;
2. Pemetaan terhadap rencana program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2022 dengan mengacu pada nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Dengan disusunnya Renja perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun Anggaran 2022.

Batulicin, Juli 2022

Kepala Pelaksana,

Eryanto Rais, SH,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19671209 199003 1 012